



KEDEPUTIAN
PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN



Kementerian PPN/
Bappenas



KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2026

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Senin, 11 Agustus 2025



DAMPAK DAK PADA PENINGKATAN BELANJA DAERAH

Peningkatan belanja daerah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Estimasi Multiplier Effect Belanja Pemerintah Daerah pada Pertumbuhan PDRB, 2017 – 2020

Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 $\Delta PDRB_{it}/PDRB_{it-1})^{\dagger}$

Pertumbuhan total belanja
 $(\Delta G_{it}/GRDP_{it-1})^{\dagger}$ **0.781***
(0.425)

- **Fiscal Multiplier** belanja Pemerintah Daerah di Indonesia diperkirakan sebesar 0,78 (berada pada tingkat moderat). Hal ini bermakna, **peningkatan belanja daerah** sebesar 1% akan diestimasikan **meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah** sebesar 0,78%.
- Untuk meningkatkan *fiscal multiplier effect* di Indonesia diperlukan **peningkatan efektivitas belanja di daerah**

DAK adalah jenis TKD yang memberikan dampak terbesar terhadap pertumbuhan total belanja daerah secara khusus belanja modal

Elastisitas Jenis TKD Per Kapita Terhadap Belanja Daerah, Per Kapita 2017 – 2021

1%

kenaikan

Meningkatkan Belanja
per Kapita (%)

PAD per Kapita	0.84
DBH per Kapita	0.98
DAU per Kapita	1.07
DAK per Kapita	1.20
TKDD lain per Kapita	0.98

Elastisitas Jenis TKD Per Kapita Terhadap Belanja Daerah, Per Kapita 2017 – 2021

1%

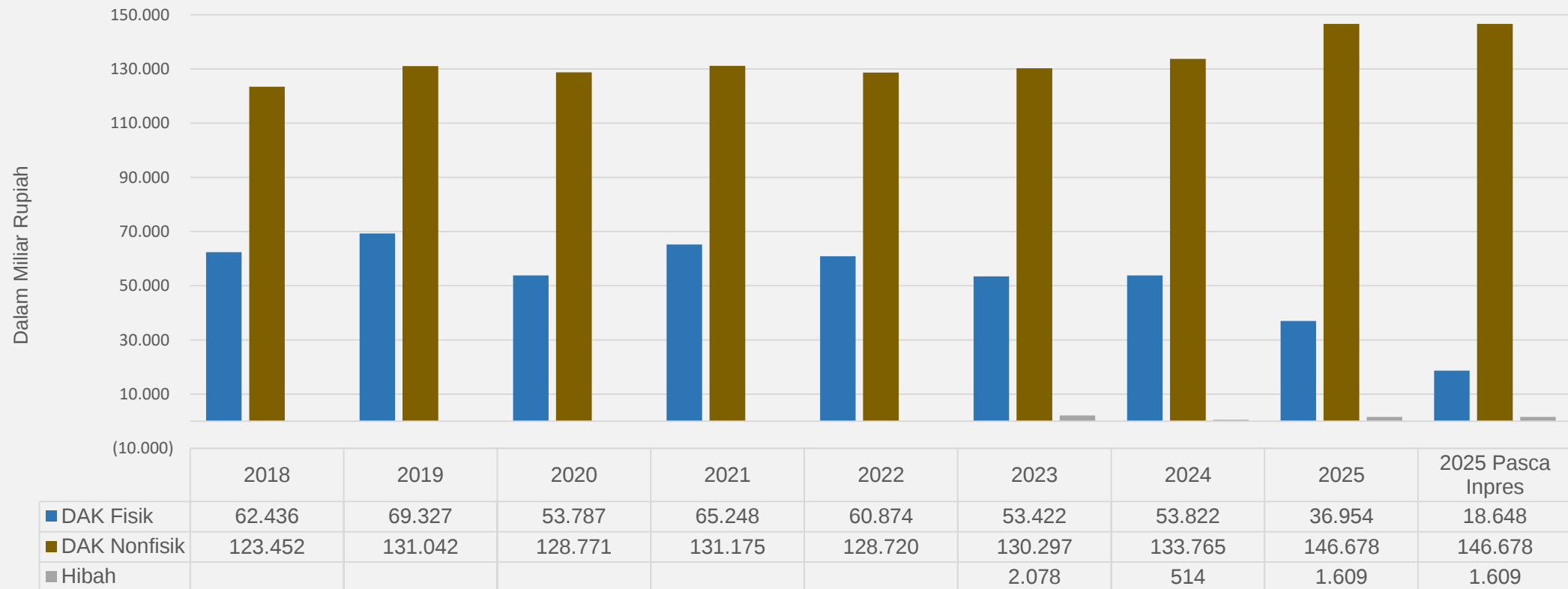
kenaikan
per Kapita

Meningkatkan Belanja per Kapita (%)

	 Pegawai	 Modal	 Barang & Jasa
PAD	0.09	0.18	0.25
DBH	0.01	0.43	0.17
DAU	0.36	0.11	0.71
DAK	-0.17	1.30	1.11

- DAK merupakan jenis TKD yang memiliki **efek stimulatif tertinggi terhadap total belanja Pemerintah Daerah**.
- DAK sebagai TKD *earmarked* lebih **mendorong peningkatan belanja modal** dimana setiap peningkatan 1% pendapatan daerah dari DAK berkorelasi dengan **peningkatan belanja modal di Daerah** sebesar **1,30%**.

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2018-2025



- Selama 8 tahun terakhir, alokasi **DAK Non Fisik cenderung meningkat**, sementara **DAK Fisik turun**. **Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan DAK harus terus didorong** dengan space fiskal yang ada.
- DAK merupakan stimulan yang **harus disinergikan dengan skema pendanaan lain**.

DEFINISI DAK

DAK adalah **bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)** yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai **program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu** yang menjadi **Prioritas Nasional** dan membantu **operasionalisasi layanan publik**, yang **penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah**.

Sumber: Pasal 1 Ketentuan Umum, UU 1/2022 tentang HKPD



Bagian
TKD



Kebijakan
tertentu



Prioritas
Nasional



Pemanfaatan
ditentukan

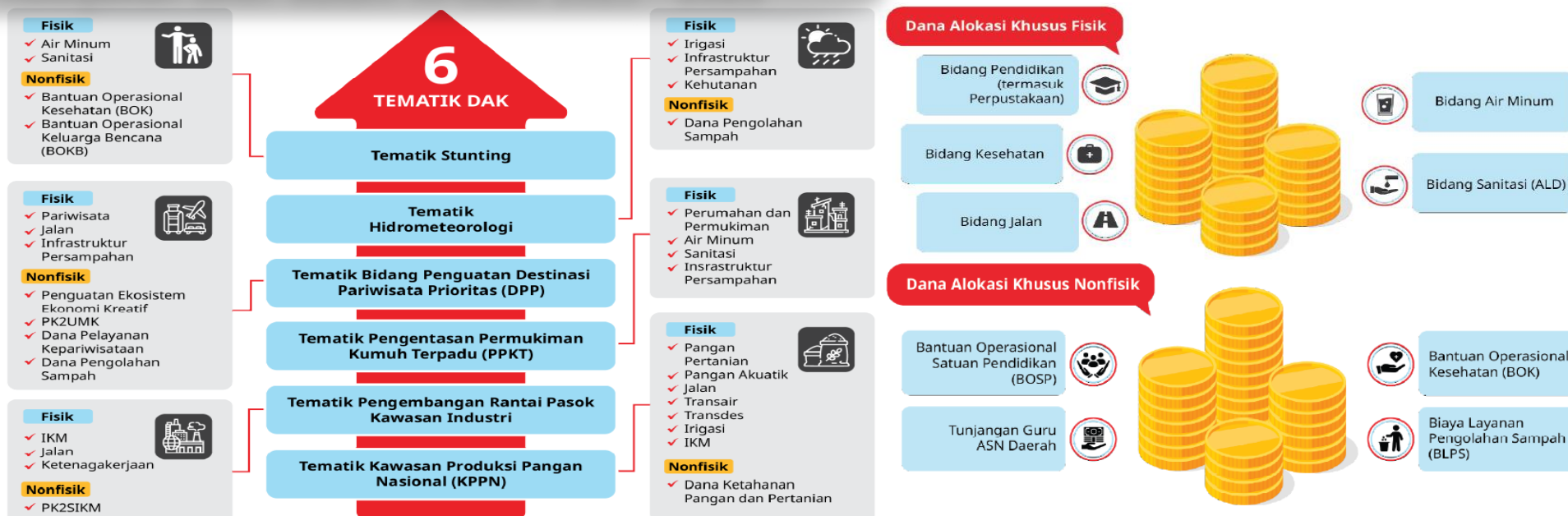
“DAK bagian TKD yang **mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**”

Pasal 131 UU 1/2022

- (1) DAK dialokasikan dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan Daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
- (3) DAK terdiri atas:
 - a. DAK Fisik
 - b. DAK Nonfisik
 - c. Hibah kepada daerah
- (4) Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat **disinergikan dengan pendanaan lainnya**.
- (6) DAK dialokasikan untuk mencapai **target kinerja Daerah** yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KEBIJAKAN DAK 2026 UNTUK MENDUKUNG ASTA CITA PRESIDEN DALAM RPJMN 2025-2029

Kebijakan DAK dalam RPJMN 2025 - 2029



Kebijakan DAK Jangka Menengah akan diturunkan dalam kebijakan DAK Tahunan

Fokus dukungan DAK

1. 8 Astacita Presiden RI
2. 17 Program Prioritas Presiden RI
3. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) Presiden RI
4. Trisula Pembangunan
5. Tujuan DAK dalam UU 1/2022

DAK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- ❑ Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
- ❑ Tematik Pengembangan Rantai Pasok Kawasan Industri
- ❑ Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)

DAK dalam Mendukung Infrastruktur Dasar

- ❑ Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)
- ❑ Tematik Hidrometeorologi
- ❑ DAK Fisik Bidang Jalan
- ❑ DAK Fisik Bidang Air Minum
- ❑ DAK Fisik Bidang Sanitasi (ALD)

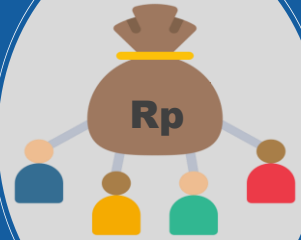
DAK dalam Mendukung Layanan Dasar dan Operasionalisasi Layanan Publik

- ❑ Tematik Stunting
- ❑ DAK Fisik Bidang Pendidikan
- ❑ DAK Fisik Bidang Kesehatan
- ❑ DAK Nonfisik Jenis BOSP
- ❑ DAK Nonfisik Jenis Tunjangan Guru ASN Daerah
- ❑ DAK Nonfisik Jenis BOK
- ❑ DAK Nonfisik Jenis BLPS

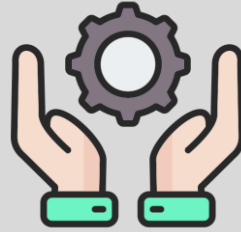
ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2026



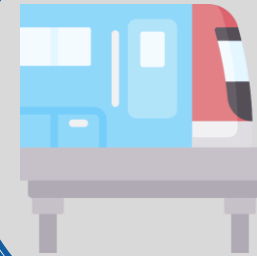
Mengarahkan pemanfaatan DAK untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta mendukung operasionalisasi layanan publik



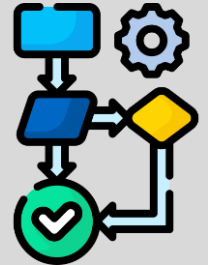
Memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial serta *matching* program



Penguatan tata kelola penyaluran langsung kepada penerima manfaat dan penyedia layanan, antara lain tunjangan guru, tunjangan dokter spesialis, dan dokter subspesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)



Melanjutkan dukungan pembangunan dan pengembangan MRT Jakarta dengan menyinergikan pembiayaan dan hibah ke daerah



Penguatan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencari dampak yang ditargetkan.

FOKUS Mendukung Layanan Dasar dan Operasionalisasi Layanan Publik

DAK Fisik



DAK Nonfisik



BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)



TUNJANGAN GURU ASN DAERAH



BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)



DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



DANA BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA



BPP PERPUSTAKAAN DAERAH

TEMATIK STUNTING



- DAK Fisik Air Minum
- DAK Fisik Sanitasi
- DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

FOKUS Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Daerah



TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)

- DAK Fisik Pertanian
- DAK Fisik Jalan



TEMATIK PARIWISATA*

- DAK Fisik Pariwisata
- DAK Fisik Jalan
- DAK Fisik Sanitasi – Infrastruktur Persampahan

HIBAH KEPADA DAERAH



Mass Rapid Transit (MRT) Project

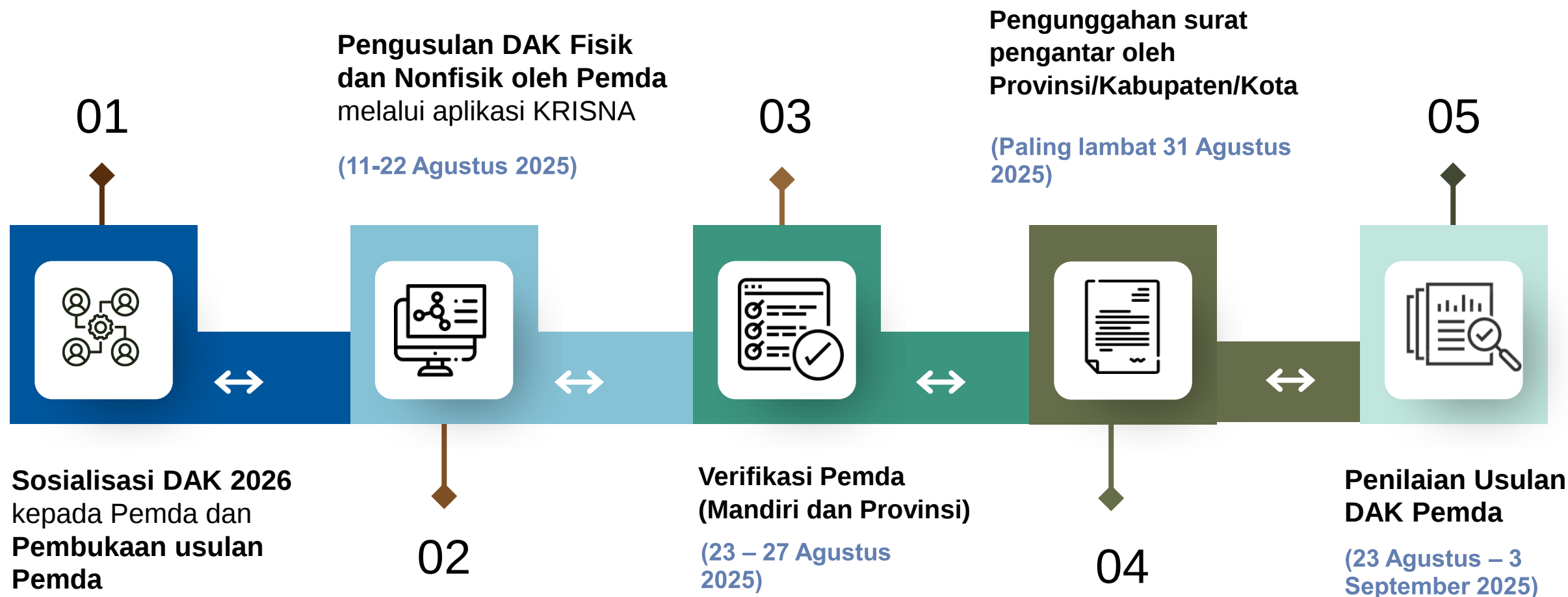


The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)



Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)

TIMELINE PERENCANAAN DAK TAHUN 2026*



*Timeline bersifat tentatif

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAK TAHUN 2026



01



Memahami konsep THIS

Penerapan konsep THIS, keterpaduan, ketuntasan, menjadi pemahaman Pemda dalam mengusulkan DAK

03



Koordinasi terkait Bappeda dengan OPD

Koordinasi dalam menentukan prioritas usulan, mempersiapkan dokumen teknis, serta dalam proses pengusulan dan memastikan keterpaduan

02



Memperkuat Sinergi Pendanaan

DAK sebagai “stimulan” sehingga perlu disinergikan dengan sumber pendanaan lain (APBN/APBD, swasta, masyarakat, dll).

04



Melaksanakan kegiatan DAK dengan sebaik-baiknya

Memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan menjaga optimalisasi penyerapan



Kementerian PPN/
Bappenas



TERIMA KASIH

